

ABSTRAK

Relawan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kerelawanannya merupakan sebuah niat dalam bentuk tindakan yang didasarkan oleh rasa kemanusiaan dengan membantu manusia lain dalam bidang kesehatan khususnya pada saat terjadinya bencana baik karna faktor alam maupun faktor non-alam dengan tanpa mengharap imbalan. Tidak menutup kemungkinan pada saat melaksanakan kegiatannya, relawan kesehatan juga bisa menjadi korban atas tindakan penyerangan termasuk oleh kalangan oknum polisi, dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan relawan kesehatan di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang spesifik dari Pemerintah dan juga diharapkan pelaku dalam tindak tersebut mendapat sanksi yang menjadikan efek jera. Dengan begitu penelitian ini membahas tentang (1) bagaimanakah reformulasi sanksi pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap relawan kesehatan?, (2) bagaimana reformulasi sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada oknum polisi yang terlibat dalam penyerangan terhadap relawan kesehatan?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan. Dan untuk metode analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif.

Hasil penelitian menyatakan pengaturan perlindungan hukum relawan kesehatan di Indonesia belum diatur secara spesifik salah satunya terhadap penyerangan oleh oknum polisi. Dalam aturan yang berlaku, sanksi yang dapat dikenakan terhadap oknum polisi yang melakukan penyerangan kepada relawan kesehatan dikenakan pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pada Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Kata Kunci: Relawan Kesehatan, Kebijakan Reformulasi, Penyerangan, Oknum Polisi

ABSTRACT

Health volunteers in carrying out their volunteering activities are an intention in the form of actions based on humanity by helping other humans in the health sector, especially during disasters both due to natural and non-natural factors without expecting compensation. It is possible that when carrying out their activities, health volunteers can also become victims of acts of attacks, including by police officers, with the writing of this thesis, it is hoped that health volunteers in Indonesia will get specific legal protection from the Government and it is also hoped that the perpetrators in these acts will receive sanctions that make a deterrent effect. That way this study discusses (1) what is the formulation of criminal sanctions related to the protection of health volunteers?, (2) how can the formulation of criminal sanctions be imposed on police officers involved in attacks on health volunteers?.

The research method used in this writing is a normative research method using a statutory approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Collection of legal materials using literature studies. And for the method of analysis of legal materials using prescriptive methods.

The results of the study stated that the legal protection arrangements for health volunteers in Indonesia have not been specifically regulated, one of which is against attacks by police officers.

In the applicable rules, sanctions that can be imposed on police officers who attack health volunteers are subject to article 170 of the Criminal Code and Article 358 of the Criminal Code. Because in Law Number 2 of 2002 concerning the Police in Article 29 paragraph (1) states that members of the National Police of the Republic of Indonesia are subject to the power of the General Court.

Keywords: Health Volunteers, Policy Formulation, Assault, Police Officers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DARTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Kegunaan Penulisan	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penulisan	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	14
BAB II : KAJIAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN REFORMULASI SANKSI TINDAK PIDANA PENYERANGAN RELAWAN KESEHATAN OLEH OKNUM POLISI.....	15

2.1 Perlindungan Hukum, Reformulasi Sanksi Pidana Dan Regulasi Tindak Pidana Penyerangan	15
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum Dan Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum.....	15
2.1.2 Reformulasi Sanksi Pidana.....	20
2.1.3 Pengertian Penyerangan Dan Unsur–Unsur Tindak Pidana Penyerangan	24
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Relawan Kesehatan dan Oknum Polisi.....	32
2.2.1 Tinjauan Umum Mengenai Relawan Kesehatan	32
2.2.1.1 Pengertian Relawan Kesehatan.....	32
2.2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kesehatan	32
2.2.2 Tinjauan Umum Mengenai Oknum Polisi	34
2.2.2.1 Pengertian Dan Fungsi Kepolisian	36
2.2.2.2 Tugas Dan Wewenang Kepolisian.....	37
BAB III REFORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS	
PENYERANGAN RELAWAN KESEHATAN OLEH OKNUM POLISI.....	40
3.1 Pengaturan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Terhadap Relawan Kesehatan	40
3.2 Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Oknum Polisi Yang Terlibat Dalam Penyerangan Terhadap Relawan Kesehatan	43
3.2.1 Pengaturan Yang Dikenakan Kepada Oknum Polisi Dalam Hal Penyerangan Terhadap Relawan Kesehatan	43
3.2.2 Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindakan Penyerangan Terhadap Relawan Kesehatan	43
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Tabel 1.2 : Unsur-unsur Pasal 170 KUHP